

ANALISIS KAUSALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGELUARAN
PEMERINTAH DAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA
DI PROVINSI SUMATERA BARAT

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S1) Pada Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:

HANIFA NOVELA
BP. 2014 / 14060023

JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019

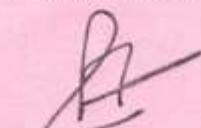
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS KAUSALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI,
PENGELUARAN PEMERINTAH DAN KUALITAS SUMBERDAYA
MANUSIA DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Nama : Hanifa Novela
NIM/TM : 14060023/2014
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2019

Disetujui Oleh:
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi



Dr. Ali Anis, M.S
NIP. 19591129 198602 1 001

Diketahui Oleh:
Pembimbing



Prof. Dr. Hasdi Aimon, M.Si
NIP. 19550505 197903 1 002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

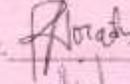
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

ANALISIS KAUSALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGELUARAN PEMERINTAH DAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Nama : Hanifa Novela
NIM/TM : 14060023/2014
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2019

Tim Penguji:

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	Prof. Dr. Hasdi Aimon, M.Si	1. 
2	Anggota	Melti Roza Adry, SE, ME	2. 
3	Anggota	Ariusni, SE, M.Si	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Hanifa Novela
 NIM / TahunMasuk : 14060023/ 2014
 Tempat / TanggalLahir : Pangkalan / 03 November 1995
 Jurusan : Ilmu Ekonomi
 Keahlian : Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan
 Fakultas : Ekonomi
 Alamat : Jln. Elang 1 No 8 Air Tawar Barat
 No. HP / Telepon : 085271610585
 JudulSkripsi : Analisis Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi,
 Pengeluaran Pemerintah dan Kualitas
 Sumberdaya Manusia di Provinsi Sumatera
 Barat

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis / skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis / skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis / skripsi ini **Sah** apabila telah ditandatangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis / skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang,2019

Yang menyatakan,



Hanifa Novela
 NIM. 14060023/2014

ABSTRAK

**Hanifa Novela
2014/14060023**

Analisis Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Kualitas Sumberdaya Manusia di Provinsi Sumatera Barat. Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, dengan dosen pembimbing Bapak Prof. Hasdi Aimon M,Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan kualitas sumberdaya manusia di Provinsi Sumatera Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan asosiatif, dimana data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa data panel dari tahun 2010 sampai tahun 2017 dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan studi kepustakaan yang diperoleh dari lembaga dan instansi terkait. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis induktif. Pada analisis induktif terdapat beberapa uji yaitu : (1) Uji Akar Unit (2) Uji Kointegrasi (3) Penentuan Lag Optimal (4) Uji Kausalitas Granger (5) Uji PVAR

Hasil Penelitian ini memperlihatkan bahwa (1) pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah memiliki hubungan satu arah dimana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pengeluaran pemerintah dengan probabilitas =0,0486 sementara pengeluaran pemerintah tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan probabilitas =0,6132 (2) pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumberdaya manusia memiliki hubungan satu arah dimana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kualitas sumberdaya manusia dengan probabilitas =0,0075 dan kualitas sumberdaya manusia tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan probabilitas =0,8402 (3) pengeluaran pemerintah dan kualitas sumberdaya manusia memiliki hubungan satu arah dimana pengeluaran pemerintah tidak mempengaruhi kualitas sumberdaya manusia dengan probabilitas =0,8251 dan kualitas sumberdaya manusia mempengaruhi pengeluaran pemerintah dengan probabilitas =0,0156 selama periode penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan kepada pihak pemerintah agar dapat mengambil kebijakan dengan meningkatkan anggaran pengeluaran pemerintah dalam menunjang peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk dapat menjalankan roda perekonomian yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Kualitas Sumberdaya Manusia, PVAR

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul “*Analisis Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Kualitas Sumberdaya Manusia*” dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Prof. Dr. Hasdi Aimon M,Si selaku pembimbing yang telah sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas-fasilitas dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Ali Anis, M.S selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Ibu Melty Roza Adry, SE, M.E

selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. Hasdi Aimon M,Si selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan penuh sabar mendengar keluhan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi serta penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang telah meluangkan banyak waktu dalam memberikan ilmu tentang soft skill, organisasi, dan bantuan miral, material sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bapak ibu Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi yang telah membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini.
7. Teristimewa kepada kedua Orang Tua, Kakak, Adik dan Keluarga tercinta yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta doa, dukungan, semangat dan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan Melni, Reni, Syara, Elvia, Fiza dan Putri
9. Kepada Angku Squad Adib, Damrul, Ciki, Fauzy, Yogi, Zikir dan Edo
10. Kepada Aji dan Ande yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Rekan-rekan sepejuangan Jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2014 tanpa terkecuali.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang. Selanjutnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya. Dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal bagi kita semua.

Padang, Februari 2019

Penulis,

Hanifa Novela

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori.....	11
1. Pertumbuhan Ekonomi	11
2. Pengeluaran Pemerintah	15
3. Kualitas Sumber Daya Manusia	25
B. Penelitian Terdahulu.....	29
C. Kerangka Konseptual.....	34
D. Hipotesis	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	37
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	37
C. Jenis Data dan Sumber Data	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Defenisi Operasional.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	57
1. Keadaan Geografis Sumatera Barat.....	57
2. Jumlah Penduduk Sumatera Barat	53
B. Hasil Penelitian	58
1. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian	60
a. Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat	60
b. Pengeluaran Pemeintah di Sumatera Barat	63
c. Kualitas Sumber Daya Manusia di sumatera Barat.....	66
2. Analisis Induktif	70
a. Uji Akar Unit (<i>Unit Roots Test</i>)	71
b. Uji Kointegrasi (<i>Panel Cointegration Test</i>).....	72
c. Lag Optimal	73
d. Hasil Uji Kausalitas Granger	74

e. Hasil Estimasi Model PVAR	76
f. Hasil Uji Stabilitas.....	81
3. Implementasi Model <i>Panel Vector Auto Reggression</i> (PVAR)	83
a. Uji Respon Variabel (<i>Impulse Response Function</i>)	83
b. Uji Kontribusi Variabel (<i>Variance Decomposition</i>)	86
4. Pengujian Hipotesis	89
C. Pembahasan	92
1. Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah	91
2. Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi dan KSDM	94
3. Kausalitas Pengeluaran Pemerintah dan KSDM	96
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	
A. Data Penelitian	106
B. Hasil Olahan Data.....	109
C. T-Tabel	119

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pekembangan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK), Pengeluaran Pemerintah dan Kualitas Sumber Daya Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2016....	6
Tabel 2.1	Nilai Max dan Min IPM.....	26
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2017.....	59
Tabel 4.2	Data Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Sumatera barat tahun 2010-2017	61
Tabel 4.3	Data Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Sumatera barat tahun 2010-2017	65
Tabel 4.4	Data Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten/Kota di Sumatera Barat 2010-2017.....	67
Tabel 4.5	Uji Stationer Variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Kualitas Sumber Daya Manusia di Sumatera Barat	71
Tabel 4.6	Output Uji Kointegrasi Variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Kualitas Sumber Daya Manusia di Sumatera Barat	72
Tabel 4.7	Output Lag Optimal	73
Tabel 4.8	Output Uji Kausalitas Granger Variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Kualitas Sumber Daya Manusia di Sumatera Barat	75
Tabel 4.9	Output Uji Vector Autoregression (VAR) Variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Kualitas Sumber Daya Manusia di Sumatera Barat	77
Tabel 4.10	Hasil Analisis Variance Decomposition (VD) Pertumbuhan Ekonomi	87
Tabel 4.11	Hasil Analisis Variance Decomposition (VD) Pengeluaran Pemerintah.....	88
Tabel 4.12	Hasil Analisis Variance Decomposition (VD) Kualitas Sumber Daya Manusia.....	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Rasio Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Nasional Berdasarkan Hukum Wagner	20
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Kualitas Sumberdaya Manusia	35
Gambar 4.1 Hasil Uji Stabilitas <i>Vector Auto Reggression</i> (VAR)	82
Gambar 4.2 <i>Impulse Response Function</i> (IRF) antara Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2017 ..	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini setiap negara selalu berupaya melaksanakan pembangunan di negaranya masing-masing, dengan harapan pembangunan yang dilakukan tersebut mampu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat banyak karena kesejahteraan dan kemakmuran rakyat merupakan tujuan utama dari pemerintahan suatu negara termasuk negara Indonesia (Todaro dan Smith, 2006: 124).

Namun masalah yang sering ditemui diberbagai negara dalam sisi perekonomian yaitu rendahnya angka pertumbuhan ekonomi terutama pada negara yang sedang berkembang sehingga kesejahteraan rakyat dan keberhasilan ekonomi sulit untuk dicapai. Pertumbuhan ekonomi sangat menarik untuk dibahas karena masalah pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian jangka panjang dan menjadi kenyataan yang selalu dialami oleh setiap negara.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan kesejahteraan warganya diukur melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai. Tinggi rendahnya laju pertumbuhan ekonomi suatu negara menunjukkan tingkat perubahan kesejahteraan ekonomi warganya. Menurut Simon Kuznets dalam (M.L Jhingan, 2012:57) pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan dalam jangka

panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi setiap penduduknya, yang terwujud dalam kenaikan output nasional secara terus menerus dan juga disertai dengan kemajuan teknologi serta adanya penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi yang dibutuhkannya.

Salah satu indikator dalam melihat pertumbuhan ekonomi regional atau daerah dalam suatu negara adalah dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan adanya PDRB kita dapat melihat laju pertumbuhan ekonomi di setiap daerah setiap tahunnya. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing wilayah ditentukan oleh potensi sumberdaya dan faktor produksinya.

Jika berbicara tentang pertumbuhan ekonomi dimana Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang tidak terlepas dari masalah pertumbuhan ekonomi. Dari data Badan pusat Statistik (BPS) bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2017 mencapai 5,07 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2016 sebesar 5,03 persen. Angka ini, menurut BPS merupakan angka pertumbuhan ekonomi tertinggi sejak tahun 2014 silam.

Perekonomian suatu negara tidak terlepas dari campur tangan atau intervensi pemerintah. Hal ini tercermin pada fungsi pengeluaran pemerintah yang dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi, bukan saja karena pengeluaran ini dapat menciptakan berbagai prasarana yang dibutuhkan dalam proses pertumbuhan ekonomi, tetapi juga merupakan salah satu komponen dari permintaan agregat

yang kenaikannya akan mendorong produksi domestik dan merangsang kegiatan ekonomi secara umum. Kriteria yang penting untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengatur rumah tangganya adalah melihat posisi keuangannya yang dilihat dari Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD) (Dumairy, 1996:157)

Kegiatan pemerintah dalam sebuah perekonomian modern tampaknya semakin besar dan terus meningkat seiring dengan kemajuan ekonomi dari tahun ke tahun. Besar kecilnya kegiatan pemerintah atau peranannya dalam perekonomian dapat dilihat dari besarnya total pengeluaran pemerintah. Peranan pemerintah dalam kegiatan ekonomi sebagian besar merupakan konsekuensi dari semakin kompleksnya dan saling ketergantungan di dalam sebuah masyarakat modern.

Hal ini dibuktikan oleh penelitian Manik dan Hidayat (2010) yang menyatakan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah di Sumatera Utara tidak memiliki hubungan timbal balik (kausalitas) dan hanya menunjukkan hubungan yang searah yaitu pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa untuk negara-negara sedang berkembang, umumnya yang menjadi pendorong laju pertumbuhan ekonomi adalah besarnya pengeluaran pemerintah.

Tidak hanya pengeluaran pemerintah dalam menjalankan aktivitas perekonomian kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan mengatur aktivitas pengeluaran pemerintah suatu negara atau daerah untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal

ini disebabkan oleh kualitas sumberdaya manusia merupakan indikator penentu dalam menentukan perkembangan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah.

Kaulitas sumberdaya manusia adalah menyangkut dua aspek yaitu aspek fisik (kualitas fisik) dan aspek non fisik (kualitas non fisik) yang menyangkut kemampuan bekerja, berpikir dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang (Notoatmodjo, 2009). Adapun Indikator dari kualitas sumberdaya manusia adalah dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) *Human Development Indeks* (HDI). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan ,pendidikan dan sebagainya.

Sumberdaya manusia sangat penting dalam pembangunan suatu bangsa, dan menjadi salah satu kunci keberhasilan ekonomi. Hal ini dikarenakan sumberdaya manusia merupakan modal dasar dari kekayaan suatu bangsa, sebagai faktor produksi yang bersifat aktif mengumpulkan modal, mengeksploitasi sumber-sumber daya alam, membangun organisasi-organisasi sosial, ekonomi, politik dan melaksanakan pembangunan nasional. Namun peningkatan perekonomian suatu daerah tidak semata-mata tergantung pada jumlah sumberdaya manusia saja, melainkan lebih menekankan pada kualitas sumberdaya manusia itu sendiri.

Hal ini dibuktikan dengan penelitian Maratade, Siske Yanti dkk (2016) menemukan hubungan antara kualitas sumberdaya manusia yang di ukur dengan IPM dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil dari proses pembangunan manusia

adalah meningkatnya kemampuan (produktivitas) sumberdaya manusia. Pembangunan manusia mampu meningkatkan kemampuan tenaga kerja, kemampuan kewirausahaan, dan kemampuan manajerial penduduk. Peningkatan kemampuan penduduk dapat meningkatkan kapasitas penduduk dalam hal penguasaan teknologi, kemampuan adaptasi, riset dan pengembangan dalam negeri,serta inovasi yang menjadi kunci untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terdiri dari 19 Kabupaten dan Kota yang selama ini terus memacu pembangunan daerahnya dan perlahan telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Provinsi Sumatera Barat salah satu daerah yang memiliki banyak potensi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat diarahkan untuk mencapai kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, yang dilakukan antara lain melalui peningkatan output (PDRB), penyerapan tenaga kerja, peningkatan pengeluaran pemerintah serta perbaikan kualitas sumber daya manusia dan program-program lainnya. Berbicara tentang Sumatera Barat dimana tingkat Pertumbuhan Ekonomi berada pada angka 5,29 persen di tahun 2017, dengan pengeluaran pemerintah sebesar 23,69 persen dan angka indek pembangunan manusia berada pada 71,24 persen. Perkembangan ketiga variabel tersebut selalu mengalami naik turun (berfluktuasi) setiap tahunnya karena disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Dimana perkembangannya mengalami naik-turun setiap tahunnya yang diakibatkan oleh berbagai macam faktor yang mempengaruhi

perkembangan variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Kualitas Sumberdaya Manusia di Sumatera Barat.

Tabel 1.1
Perkembangan laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK 2010), Pengeluaran Pemerintah (Belanja Modal) serta Kualitas Sumberdaya Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2017

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)		Pengeluaran Pemerintah (%)		IPM (%)	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	Kepulauan Mentawai	5,02	5,13	10,48	68,33	58,27	59,25
2	Pesisir Selatan	5,33	5,42	2,48	0,54	68,39	68,74
3	Kab.Solok	5,31	5,33	14,50	0,77	67,67	67,86
4	Sijunjung	5,26	5,27	45,48	2,84	66,01	66,6
5	Tanah Datar	5,03	5,12	37,03	18,50	70,11	70,37
6	Padang Pariaman	5,52	5,59	45,93	18,08	68,44	68,9
7	Agam	5,41	5,43	19,71	45,40	70,36	71,10
8	Lima Puluh Kota	5,32	5,34	45,23	-3,28	68,37	68,69
9	Pasaman	5,07	5,09	32,52	-0,57	64,57	64,94
10	Solok Selatan	5,12	5,15	8,44	2,38	67,47	67,81
11	Dharmasraya	5,42	5,45	0,33	28,96	70,25	70,40
12	Pasaman Barat	5,33	5,35	48,08	-10,44	66,03	66,83
13	Padang	6,22	6,23	41,98	17,53	81,06	81,58
14	Kota Solok	5,76	5,78	41,28	23,33	77,07	77,44
15	Sawahlunto	5,73	5,75	-1,93	38,65	70,67	71,13
16	Padang Panjang	5,80	5,81	32,12	96,78	76,5	77,01
17	Bukittinggi	6,05	6,08	16,99	31,00	79,11	79,80
18	Payakumbuh	6,09	6,12	-1,92	17,78	77,56	77,91
19	Pariaman	5,59	5,62	4,81	0,84	75,44	75,71
	Sumatera Barat	5,27	5,29	22,46	23,69	70,73	71,24

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar

Dilihat dari tabel 1.1 bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat mengalami kenaikan pertumbuhan di tahun 2016 sebesar 5,27 persen menjadi 5,29 persen di tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat

sepanjang tahun 2017 hanya tumbuh 0,02 persen. Pertumbuhan tertinggi di tahun 2016 dan 2017 yaitu Kota Padang sebesar 6,22 persen dan 6,23 persen. Sedangkan yang terendah pada tahun 2016 yaitu Kepulauan Mentawai sebesar 5,02 persen dan tahun 2017 yaitu Tanah Datar sebesar 5,12 persen. Kenaikan tersebut di dukung oleh sektor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti lapangan usaha pertanian yang merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian Sumatera Barat pada tahun 2017.

Dapat juga dilihat bahwa rata-rata pengeluaran pemerintah kabupaten/Kota di Sumatera Barat mengalami kenaikan pertumbuhan di tahun 2016 sebesar 22,46 persen menjadi 23,69 persen di tahun 2017. Laju pertumbuhan pengeluaran pemerintah tertinggi di tahun 2016 yaitu Kabupaten Pasaman Barat sebesar 48,08 persen dan tahun 2017 yaitu Padang Panjang sebesar 96,78 persen. Sedangkan pengeluaran terendah pada tahun 2016 yaitu Payakumbuh sebesar -1,92 persen dan pada tahun 2017 yaitu Kabupaten Pasaman sebesar -0,57 persen. Meningkatnya pengeluaran pemerintah dari tahun 2016-2017 disebabkan oleh meningkatnya belanja modal dan belanja barang dan jasa seiring dengan mulai dikerjakannya proyek pemerintah. Selain itu kenaikan penyerapan belanja daerah juga berasal dari meningkatnya belanja bagi hasil untuk Kabupaten/Kota dan desa serta belanja pegawai seiring pemberian gaji ke-13 dan ke-14.

Dapat dilihat bahwa pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada periode 2016-2017 mengalami kenaikan sebesar 70,73 persen menjadi 71,24 persen di tahun 2017. Pertumbuhan IPM tertinggi di tahun 2016-2017 yaitu Kota

padang sebesar 81,06 persen dan 81,58 persen. Sedangkan pertumbuhan IPM terendah pada tahun 2016-2017 yaitu Kepulauan Mentawai sebesar 58,27 persen dan 59,25 persen.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa terjadi fenomena dimana naiknya pertumbuhan ekonomi dari tahun 2016 ke 2017 tidak diikuti oleh naiknya pengeluaran pemerintah di tahun yang sama pada sebagian besar daerah yang berada di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Hanya beberapa daerah ketika pertumbuhan ekonominya naik dari tahun 2016 ke 2017 pengeluaran pemerintahnya juga naik yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan angka 10,48 persen menjadi 68,33 persen. Naiknya anggaran realisasi pemerintah dalam rangka membenahan transportasi lokal seperti pelabuhan rokot yang harus ditutaskan segala kekurangan pembangunannya. Kemudian Agam, Dharmasraya, Sawahlunto, Padang Panjang dan Bukittinggi dan Payakumbuh.

Hal ini tentu tidak sejalan dengan penelitian Harjanto (2014) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah memiliki hubungan positif yang didukung oleh hukum Wagner yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi pengeluaran pemerintah. artinya apabila pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan maka pengeluaran pemerintah juga akan naik. Dan penelitian yang dilakukan oleh Cheng dan Leng, (1997) yang menyatakan bahwa adanya hubungan kausal (timbal balik) antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di Korea Selatan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonominya dan

sebaliknya dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyebabkan pengeluaran pemerintah di Korea Selatan akan meningkat.

Dan turunnya pengeluaran pemerintah dari tahun 2016 ke 2017 pada sebagian besar daerah yang berada di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tidak diikuti oleh turunnya angka indeks pembangunan manusia pada daerah yang sama dan periode yang sama. Tetapi angka indeks pembangunan manusia mengalami kenaikan dari tahun 2016 ke 2017 walaupun ada dua daerah yaitu Sijunjung dan Padang Pariaman yang mengalami penurunan pada tahun yang sama. Dengan adanya ketidaksesuaian tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti keterkaitan antar variabel yang akan diteliti, maka judul dalam penelitian ini adalah:

“Analisis Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Sumatera Barat”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat hubungan kausalitas antara pe Dan turunnya pengeluaran pemerintah dari tahun 2016 ke 2017 pada sebagian besar daerah yang berada di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tidak diikuti oleh turunnya angka indeks pembangunan manusia pada daerah yang sama dan periode yang sama. Tetapi angka indeks pembangunan manusia mengalami kenaikan dari tahun 2016 ke 2017 walaupun ada dua daerah yaitu Sijunjung dan Padang Pariaman yang mengalami penurunan pada tahun yang

sama.rumbuhan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah di Provinsi Sumatera Barat?

2. Apakah terdapat hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dengan kualitas sumberdaya manusia di Provinsi Sumatera Barat?
3. Apakah terdapat hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah dengan kaulitas sumberdaya manusia di Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui hubungan kausalitas pertumbuhan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah di Provinsi Sumatera Barat
2. Mengetahui hubungan kausalitas pertumbuhan ekonomi dengan kualitas sumberdaya manusia di Provinsi Sumatera Barat
3. Mengetahui hubungan kausalitas pengeluaran pemerintah dengan kualitas sumberdaya manusia di Provinsi Sumatera Barat

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.
2. Bagi ilmu pengetahuan, sebagai pengembangan ilmu dan pembaharuan data dari penelitian terdahulu.
3. Bagi pemerintah, sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan atau kebijakan.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2006: 9-10). Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator untuk melihat kinerja perekonomian. Menurut Simon Kuznets dalam (M.L Jhingan, 2012:57) pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara (daerah) untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, yang terwujud dengan adanya kenaikan output nasional secara terus-menerus yang disertai dengan kemajuan teknologi serta adanya penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi yang dibutuhkannya.

Biasanya indikator yang sering digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat Nasional dan PDRB pada tingkat Regional (Provinsi). PDB memperlihatkan jumlah output yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dan mengacu pada jumlah output yang dihasilkan tersebut maka pertumbuhan ekonomi dapat dihitung serta diperkirakan (Mankiw. 2007:17)

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

1. Adam Smith

Adam Smith ternyata bukan saja terkenal sebagai pelopor pembangunan ekonomi dan kebijaksanaan *laissez-faire*, tetapi juga merupakan ekonom pertama yang banyak menumpahkan perhatian kepada masalah pertumbuhan ekonomi. Dalam bukunya *An Inquiry into the Natural and Causes of the Wealth of Nation* (1776) ia mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang yang sistematis. Agar inti dari proses pertumbuhan ekonomi menurut Smith ini mudah dipahami, dibedakan menjadi dua aspek utama pertumbuhan ekonomi yaitu pertama pertumbuhan output total yang terdiri dari sumberdaya alam yang tersedia, sumberdaya manusia serta stok barang modal yang ada. Kedua pertumbuhan penduduk dimana menurut Adam Smith jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari upah subsisten yaitu upah yang pas-pasan untuk hidup. (Arsyad, 20014:55)

2. Pandangan David Ricardo

Garis besar pertumbuhan ekonomi dan kesimpulan-kesimpulan dari Ricardo tidak jauh berbeda dengan teori Adam Smith. Pandangan Ricardo berfokus pada laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output. Selain itu Ricardo juga mengungkapkan adanya ketebatasan faktor produksi tanah yang bersifat tetap sehingga akan menghambat proses pertumbuhan ekonomi (*The law of demishing return*). Proses pertumbuhan ekonomi menurut David Ricardo dalam Arsyad (2004) yaitu:

- a. Jumlah tanah terbatas
 - b. Tenaga kerja (penduduk) meningkat atau menurun tergantung pada apakah tingkat upah diatas atau dibawah tingkat upah minimal
 - c. Akumulasi modal terjadi bila tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik modal berada diatas tingkat keuntungan minimal yang diperlukan untuk menarik mereka melakukan investasi
 - d. Kemajuan tekonologi terjadi sepanjang waktu
 - e. Sektor pertanian dominan.
- b. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik
1. Yoseph Schumpeter

Ahli ekonomi Neo-Klasik yang terkenal, yaitu Yoseph Schumpeter, dalam bukunya yang berbahasa Jerman pada tahun 1991 yang dikemukakan pada tahun 1934 diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judul *The Theory of Economics Development* menekankan tentang peranan pengusaha dalam pembangunan. Menurut Schumpeter faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah proses inovasi dan pelakunya adalah para inovator atau wiraswasta. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi oleh para entrepreneur. Dan kemajuan ekonomi tersebut diartikan sebagai peningkatan output total masyarakat.

Dalam membahas perkembangan ekonomi, Schumpeter membedakan pengertian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi walaupun keduanya merupakan sumber peningkatan output masyarakat. Menurut Schumpeter,

pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan teknologi produksi itu sendiri. Misalkan kenaikan output yang disebabkan oleh pertumbuhan stok modal tanpa perubahan teknologi produksi yang lama.

Sedangkan pembangunan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh para wisaswasta. Inovasi disini berarti perbaikan teknologi dalam arti luar misalnya penemuan produk baru , pembukaan pasar baru dll. Inovatif tersebut menyangkut perbaikan kuantitatif dari sistem ekonomi itu sendiri yang bersumber dari dari kreativitas para wiraswastanya. (Arsyad, 2004:69-70).

a. Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengeluaran pemerintah

Dalam penelitian Linda (2016) Pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah memiliki hubungan yang positif. Hukum Wagner (*Wagner's Law*) menyatakan bahwa peningkatan perekonomian yang terjadi mempengaruhi pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Wagner menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi lah yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah. Jelasnya, dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat yaitu tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang

mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan demokrasi dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintahan.

b. Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kualitas sumber daya manusia

Dalam penelitian Maratade, dkk (2016) menyatakan bahwa Terdapat keterkaitan antara laju pertumbuhan ekonomi perkapita dengan pembangunan manusia, dimana hubungan yang terjadi bersifat timbal balik, artinya laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pembangunan manusia, sebaliknya pembangunan manusia juga mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi melalui dapat terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas. Sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan modal utama dalam menggerakkan dan mempercepat laju roda perekonomian, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan per kapita yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan perkapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun.

2. Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah serta pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk keperluan administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan (Sukirno, 2002). Pengeluaran Pemerintah merupakan komponen relatif paling kecil dibanding pengeluaran yang lain, namun efek yang ditimbulkan cukup besar, baik sebagai

fungsi alokasi, distribusi, maupun stabilisasi. Pengeluaran pemerintah bersifat otonom, karena penentuan anggaran pemerintah lebih pada : Pajak yang diharapkan akan diterima, Pertimbangan politik dan Permasalahan yang dihadapi (Samuelson & Nordhaus, 2001).

Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya dalam APBN (Anggaran pendapatan Belanja Negara). Tujuan dari ini dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah yang terlihat dalam APBN dapat dibagi dua kelompok utama yaitu sebagai berikut:

1. Pengeluaran Rutin Pemerintah

Pengeluaran rutin pemerintah yaitu pengeluaran pemeliharaan atau penyelenggaraan pemerintah sehari-hari. Dalam pengeluaran rutin ini termasuk seperti belanja pegawai, belanja barang, bunga dan cicilan utang. Pengeluaran rutin pemerintah ini memegang peranan yang penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintah serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas yang pada akhirnya mencapai sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Penghematan dan efisiensi pengeluaran rutin untuk menambah besarnya tabungan pemerintah yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan nasional. Penghematan dan efisiensi tersebut dapat diupayakan melalui pinjaman, alokasi pengeluaran rutin dan pengendalian koordinasi pelaksanaan pembelian barang-barang dan jasa-jasa

kebutuhan departemen atau lembaga negara non departemen serta pengurangan subsidi secara bertahap.

2. Pengeluaran pembangunan

Pengeluaran pemerintah menurut sektor-sektor pembangunan yang lebih bersifat sebagai akumulasi stok kapital. Kondisi tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan alokasi pengeluaran pembangunan agar mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi.

Dalam kebijakan fiskal dikenal beberapa kebijakan anggaran yaitu anggaran berimbang, anggaran surplus dan anggaran defisit. Anggaran berimbang berimbang yaitu suatu kondisi dimana penerimaan sama dengan pengeluaran. Anggaran surplus yaitu pengeluaran lebih kecil dari penerimaan. Sedangkan anggaran defisit yaitu anggaran pengeluaran lebih besar dari penerimaan. Anggaran surplus digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah inflansi. Sedangkan anggaran defisit digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah pengangguran dan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi angka pengangguran maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya. Pengeluaran pemerintah terdiri dari pengeluaran rutin atau belanja aparatur daerah dan pengeluaran pembangunan.

a. Teori pengeluaran pemerintah Keynes

Pendapatan Nasional dirumuskan sebagai $Y = C + I + G + X - M$ yang kemudian dijadikan sebagai acuan utama kaum Keynesian dalam menjelaskan teori yang mengaitkan peran pemerintah di dalam perekonomian. Berdasar pada acuan tersebut terlihat bahwa kenaikan (penurunan) pengeluaran pemerintah akan berefek

pada menaikkan (menurunkan) pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah dalam hal ini adalah salah satu dari unsur permintaan agregat. Formula $Y = C + I + G + X - M$ dikenal sebagai identitas dari pendapatan nasional, karena perhitungan pendapatan nasional yang diterapkan dilakukan dengan pendekatan pengeluaran. Y pada formula diatas mewakili pendapatan nasional, sekaligus dapat berupa penawaran agregat, sedangkan variable- variabel yang berada pada sisi kanan formula tersebut disebut sebagai permintaan agregat. G merupakan variabel yang melambangkan pengeluaran pemerintah. Maka jika ingin melihat kontribusi pengeluaran pemerintah dalam menguatkan pendapatan nasional maka dapat dilakukan dengan membandingkan nilai G terhadap nilai Y dengan melakukan pengamatan dari waktu ke waktu. (Dumairy, 1996).

b. Teori Makro

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyaknya kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Teori makro dibedakan menjadi 3 yaitu:

1. Model Pembangunan tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti

halnya, program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.

Teori perkembangan peranan pemerintah yang dikemukakan oleh Musgrave dan Rostow adalah suatu pandangan yang ditimbulkan dari pengamatan berdasarkan pembangunan ekonomi yang dialami oleh banyak negara, tetapi tidak didasarkan oleh suatu teori tertentu.

2. Hukum Wagner

Wagner mengatakan didalam teorinya dalam perekonomian jika pendapatan perkapita naik, secara relatif akan berpengaruh pada pengeluaran pemerintah dengan naiknya persentasenya. (Mangkoesobroto, 1995) Formula hukum wagner dalam dituliskan sebagai berikut:

$$\frac{GpC_t}{YpC_t} > \frac{GpC_{t-1}}{YpC_{t-1}} > \frac{GpC_{t-2}}{YpC_{t-2}} \dots\dots > \frac{GpC_{t-n}}{YpC_{t-n}}$$

Keterangan :

GpC : Pengeluaran pemerintah per kapita

YpC : Produk dan pendapatan nasional per kapita

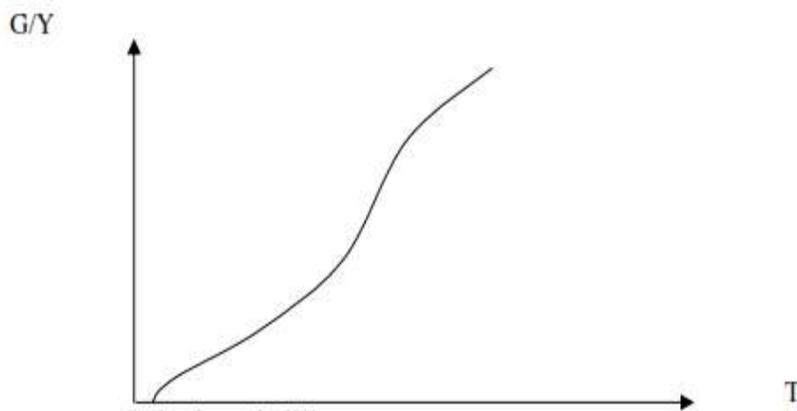
t : Indeks waktu (tahun)

Setidaknya ada 5 faktor menurut teori Wagner yang menjadi sebab mengapa terjadi peningkatan pada pengeluaran pemerintah, yaitu:

1. Desakan meningkatkan perlindungan melalui sektor pertahanan dan keamanan

2. Pendapatan masyarakat yang mengalami kenaikan
3. Terjadinya perkembangan demografi
4. Terjadi urbanisasi yang beriringan pertumbuhan ekonomi
5. Perkembangan pemerintah yang didalamnya terdapat ketidak efisienan birokrasi. (Dumairy, 1996)

Secara grafik rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional ditunjukkan oleh sebuah kurva yang eksponensial sebagaimana terlihat pada gambar 2.1 dibawah ini:



Gambar 2.1 Rasio Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Nasional berdasarkan Hukum Wagner

Menurut Wagner pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan hubungan antara industri-industri, industri masyarakat dan sebagainya akan semakin rumit dan kompleks sehingga potensi terjadi kegagalan pasar eksternalitas negatif menjadi besar. Sejalan dengan itu di tunjukkan pada gambar 2.1 secara relatif peranan pemerintah akan semakin meningkat (Mangkoesoebroto, 1995:171).

c. Teori Mikro

Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan akan menimbulkan permintaan akan barang lain. Teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut: penentuan permintaan dan penentuan tingkat output. (Mangkoesoebroto, 1995:177).

Menurut organisasi, pengeluaran negara diklasifikasikan menjadi tiga, adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Pusat

APBN atau biasa disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ialah dana yang dipergunakan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat diklasifikasikan lagi menjadi dua yaitu pengeluaran keperluan belanja dan pengeluaran keperluan pembiayaan. Pengeluaran belanja yang dilakukan pemerintah dapat berupa, memberi gaji pegawai, belanja barang-barang negara, belanja modal, pembayaran bunga utang luar negeri, subsidi berbagai sektor, bantuan sosial, dan lain sebagainya. Terdapat dana yang dialokasikan untuk daerah dalam keperluan belanja ini, sebagai dana perimbangan

dan dana otonomi khusus serta penyesuaian. Sedangkan pengeluaran pembiayaan meliputi beberapa hal seperti untuk pembayaran pokok pinjaman luar negeri, obligasi pemerintah, dan lain sebagainya

2. Provinsi

Pada skala dibawah pemerintah pusat terdapat provinsi yang memiliki nama APBD yang merupakan hasil dari dana alokasi APBN dari pemerintah pusat dan hasil dari pungutan pajak dari masyarakat. Dana APBN diperuntukkan untuk pengeluaran belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasional mencakup belanja pegawai, belanja barang-barang dan jasa, pemeliharaan, perjalanan dinas, pinjaman, belanja subsidi, hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja operasional bentuk lainnya. Sedangkan belanja modal mencakup belanja aset tetap, dan belanja-belanja yang sifatnya tak terduga.

3. Pemerintah Kabupaten/Kota

Jika pada skala nasional tadi bernama APBN dan pada skala dibawahnya yaitu provinsi bernama APBD, maka pada skala dibawah provinsi dalam hal ini kabupaten/kota nama yang digunakan juga sama yaitu APBD. APBD Kabupaten/Kota dipergunakan guna keperluan pengeluaran belanja, yang juga diperuntukkan kepada Desa/Kelurahan, Bagi hasil tersebut meliputi bagi hasil yang bersumber dari pajak ke Desa/Kelurahan, bagi hasil dari retribusi ke Desa/Kelurahan, bagi hasil pendapatan lainnya ke Desa/Kelurahan, pengeluaran untuk keperluan Pembiayaan, yang terdiri dari penyertaan modal pemerintah,

pembayaran Pokok Pinjaman, dan pemberian pinjaman untuk BUMD/ BUMN/.

Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

a. Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dalam penelitian Harjanto, (2014) menyatakan bahwa Pengeluaran pemerintah memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Aliran Keynesian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi. Pandangan Keynesian menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah yang mendorong peningkatan permintaan agregat yang diikuti peningkatan produksi barang dan jasa yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga pengeluaran pemerintah dipandang sebagai kekuatan eksogenus yang mengubah output agregat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam kasus ini pertumbuhan ekonomi sebagai fungsi dari pengeluaran pemerintah.

Uraian mengenai keseimbangan mengikut pendekatan penawaran agregat-pengeluaran agregat menunjukkan bahwa keseimbangan dicapai apabila: $Y = C + I + G + X - M$ (Dumairy, 1996: 161). Persamaan diatas dikenal sebagai persamaan identitas pendapatan nasional, dimana Y adalah pendapatan nasional sekaligus sebagai penawaran agregat, G menyatakan pengeluaran pemerintah, I menyatakan investasi, X-M adalah net ekspor. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamatinnya dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional. Hasil studi Cheng dan Lai (1997) menemukan adanya hubungan timbal balik antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan. Hasil ini menunjukkan

bahwa pengeluaran pemerintah di Korea Selatan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyebabkan pengeluaran pemerintah di Korea Selatan juga meningkat

b. Pengeluaran Pemerintah terhadap Kualitas Sumberdaya Manusia

Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan memiliki pengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia yang di ukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kahang, Meheng dkk (2016) menjelaskan hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan IPM . Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kutai Timur. Artinya, apabila pengeluaran pemerintah provinsi bidang pendidikan naik maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga akan naik. Pendidikan merupakan salah satu *basic needs* dimana pemenuhanya mengindikasikan tingkat kesejahteraan. Dalam praktiknya, pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai kegiatan pendidikan. Seperti yang kita ketahui, pendidikan merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan diharapkan mampu menaikkan kualitas pendidikan suatu negara.

Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kutai Timur. Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan digunakan untuk membangun, memelihara, dan meningkatkan sarana serta prasarana kesehatan guna meningkatkan kualitas

kesehatan masyarakat. Peningkatan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan mengindikasikan upaya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan agar kesehatan masyarakat meningkat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat ini tercermin dalam naiknya angka harapan hidup, turunnya nilai kematian bayi, turunnya angka kematian ibu melahirkan, dll. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Todaro dan Smith (2003) menyatakan pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan yang dikeluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan layanan kesehatan untuk peningkatan produktivitas masyarakat.

3. Teori Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung produktivitas dan aktivitas agar tujuan negara dapat tercapai dengan sempurna. Sumber daya manusia juga merupakan faktor kunci dalam reformasi ekonomi yakni bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta daya saing yang tinggi dalam persaingan global.

Kualitas sumberdaya manusia adalah menyangkut dua aspek yaitu aspek fisik (kualitas fisik) dan aspek non fisik (kualitas non fisik) yang menyangkut kemampuan

bekerja, berpikir dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang (Notoatmodjo, 2009). Oleh sebab itu upaya dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia ini juga dapat diarahkan kepada kedua aspek tersebut. Notoatmojo menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia sebuah bangsa ditentukan oleh 3 faktor utama yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Indikator dari kualitas sumber daya manusia adalah dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Menurut Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks Pembangunan Manusia diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR).

Tabel 2.1 Nilai Maksimum dan Minimum Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Faktor	Komponen	Kondisi	
		Ideal	Terburuk
	Angka Harapan Hidup (thn)	85,8	25,0
Kelangsungan hidup	Angka melek huruf (%)	100,0	0,0
Pengetahuan	Rata-rata lama sekolah (thn)	15	0
Daya Beli	Konsumsi riil perkapitas (Rp)	732,720	300,000

Sumber : UNDP, *Human Development Report 1993 dalam Mudrajat, 2006: 31*

Dengan tiga ukuran pembangunan tersebut dan menerapkan suatu formula yang kompleks terhadap data 160 negara pada tahun 1990, ranking HDI semua negara dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. Negara dengan pembangunan manusia yang rendah (*low human development*) bila nilai HDI berkisar 0,0 hingga 0,50.
- b. Negara dengan pembangunan manusia yang menengah (*medium human development*) bila nilai HDI berkisar antara 0,51 hingga 0,79.
- c. Negara dengan pembangunan manusia yang tinggi (*high human development*) bila nilai HDI berkisar antara 0,80 hingga 1,0.

Dapat disimpulkan bahwa negara dengan nilai HDI dibawah 0,51 hingga 0,79 negara tersebut mulai memperhatikan pembangunan manusianya, sedangkan negara dengan nilai HDI 0,8 berarti negara tersebut sangat memperhatikan pembangunan manusianya (Mudrajat, 2006: 31).

Perhitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia memiliki tujuan penting, diantaranya :

- a. Membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih.
- b. Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana.
- c. Membentuk satu indeks komposit dari pada menggunakan sejumlah indeks dasar.
- d. Menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi.

a. Kualitas Sumberdaya Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kualitas sumber daya manusia merupakan hal terpenting dalam menjalankan perekonomian suatu negara. Salah satu indikator yang digunakan oleh *United Nations Development Program* (UNDP) untuk mengukur kualitas sumber daya manusia adalah Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tingginya kualitas sumber daya manusia disuatu wilayah yang salah satunya ditunjukkan oleh tinggi nilai IPM dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah wilayah tersebut. Hasil penelitian Maratade, dkk (2016) menemukan hubungan antara kualitas sumber daya manusia yang di ukur dengan IPM dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil dari proses pembangunan manusia adalah meningkatnya kemampuan (produktivitas) sumber daya manusia. Pembangunan manusia mampu meningkatkan kemampuan tenaga kerja, kemampuan kewirausahaan, dan kemampuan manajerial penduduk. Peningkatan kemampuan penduduk dapat meningkatkan kapasitas penduduk dalam hal penguasaan teknologi, kemampuan adaptasi, riset dan pengembangan dalam negeri,serta inovasi yang menjadi kunci untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi.

b. Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Pengeluaran Pemerintah

Kualitas sumber daya manusia yang di ukur dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki hubungan positif dengan pengeluaran pemerintah. Ranis (2004), dalam penelitiannya menemukan bahwa pembangunan manusia merupakan prasyarat untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,

kebijakan pemerintah dan pendanaan publik mungkin perlu ditingkatkan. Negara dalam ambang batas pembangunan manusia apabila suatu bangsa terjebak siklus perangkap kemiskinan. Rendahnya pembangunan manusia mungkin perlu target pemerintah dalam menginvestasikan dalam memenuhi biaya perbaikan pembangunan manusia . investasi ini meliputi biaya tetap sekolah, rumah sakit dan yang diperlukan perbaikan pemerintahan untuk secara efektif melaksanakan proyek investasi tersebut.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis tentunya memerlukan kajian terdahulu atau penelitian empiris sejenis untuk mendukung penelitian yang penulis lakukan. Dimana nantinya dapat digunakan sebagai referensi untuk melihat apakah penelitian yang dilakukan mendukung atau tidak dengan penelitian sebelumnya.

1. Harjanto (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Hubungan Kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah di Indonesia” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dibagi menurut fungsi umum jasa, fungsi pertahanan, keamanan dan ketertiban umum, fungsi ekonomi dan fungsi pendidikan. Menggunakan uji Toda-Yamamoto Causality, yang dapat digunakan dalam data time-series dengan berbagai tingkat integrasi, kami menemukan hubungan kausalitas searah antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah dimana pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang mendukung Hukum Wagner. Pada pengeluaran berdasarkan fungsi, kami menemukan hubungan yang

- mendukung keynessian pendekatan antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah dalam fungsi ekonomi. Ditempat lain fungsi pengeluaran pemerintah kita tidak menemukan adanya hubungan kausalitas dengan pertumbuhan ekonomi
2. Maratade, dkk (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara“. Masalah Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia sekarang ini adalah mengenai hubungan dua arah (kausalitas) yang artinya bahwa apakah ada hubungan kausalitas antara Pertumbuhan Ekonomi dan indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi utara, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kausalitas antara Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara. Data yang digunakan adalah datasekunder dalam kurun waktu 2002-2013 dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. Dengan kesimpulan dari hasil uji kausalitas kedua variabel tersebut adalah H_0 di tolak artinya kedua variabel tersebut mempunyai hubungan dua arah, Pertumbuhan Ekonomi mempunyai hubungan kausalitas dengan Indeks Pembangunan Manusia dan sebaliknya, Indeks Pembangunan Manusia mempunyai hubungan kausalitas dengan Pertumbuhan Ekonomi.
 3. Anitasari dan Soleh, (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu“. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu dengan menggunakan data sekunder periode pengamatan tahun 2001-2012 yang

diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Hasil analisis dengan menggunakan SPSS 16 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu. Jika pemerintah menaikkan pengeluaran pemerintah sebesar 1 miliar rupiah, maka akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,17 % per tahun. Sedangkan pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah kabupaten/kota menunjukkan bahwa dari jumlah 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, kabupaten Rejang Lebong dan kota Bengkulu yang memiliki hasil bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Kabupaten Bengkulu Utara memiliki pengaruh yang negatif sedangkan 7 kabupaten lainnya memiliki hasil yang positif namun tidak signifikan. Sebagian besar kabupaten di Provinsi Bengkulu dikategorikan sebagai daerah yang baru membangun yang merupakan hasil pemekaran pasca pemberlakuan otonomi daerah. Sehingga dalam jangka pendek pengeluaran pemerintah dianggap belum mampu menstimulus kegiatan sektor-sektor perekonomian serta memacu pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

4. Linda, (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Kausalitas dan Kointegrasi antara Pengeluaran Pemerintah dan pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 1803-2014”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kausalitas (hubungan timbal balik) dan kointegrasi (hubungan jangka panjang) antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi kurun waktu 1983 – 2014 di Provinsi Riau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Cointegrasi test dan

Granger Causality test dengan menggunakan software Eviews 9. Uji kointegrasi dilakukan dengan menggunakan metode Johansen's Cointegration Test. Hasil Uji Johansen's Cointegration Test diperoleh nilai trace statistic ataupun max-eigen lebih besar dari critical value pada tingkat keyakinan $\alpha = 5\%$. Dari hasil uji kointegrasi mengindikasikan bahwa diantara perubahan pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan stabilitas/keseimbangan dan kesamaan pergerakan dalam jangka panjang. Hasil uji kausalitas granger diperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pengeluaran langsung pemerintah yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0,0054 lebih kecil dari 5% begitu juga dengan pengeluaran tidak langsung pemerintah dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0,0002 lebih kecil dari 5%. Dari hasil diatas maka untuk Provinsi Riau tidak berlaku hubungan timbal balik antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi tetapi hanya terjadi hubungan searah yaitu pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pengeluaran pemerintah baik pengeluaran langsung maupun tidak langsung.

5. Manik dan Hidayat (2010) hasil penelitian ini menyatakan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah di Sumatera Utara tidak memiliki hubungan timbal balik (kausalitas) dan hanya menunjukkan hubungan yang searah yaitu pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa untuk negara-negara sedang

berkembang, umumnya yang menjadi pendorong laju pertumbuhan ekonomi adalah besarnya pengeluaran pemerintah.

6. Cheng dan Leng, (1997) menyatakan bahwa adanya hubungan kausal (timbang balik) antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di Korea Selatan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonominya dan sebaliknya dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyebabkan pengeluaran pemerintah di Korea Selatan akan meningkat
7. Loizides dan Vamvoukas (2005) menyatakan hubungan antara pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan inflasi atau pengangguran sebagai variabel ketiga di Yunani (1948-1995), Inggris Raya dan Irlandia (1950-1995). Menggunakan bivariat dan trivariat *causality* dengan metode kointegrasi, ECM dan kausalitas Granger. Dari uji kausalitas bivariat antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah ditemukan hasil bahwa di Yunani berlaku hukum Wagner dimana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pengeluaran pemerintah, sementara di Irlandia dan Inggris Raya berlaku teori Keynes. Sementara untuk Yunani dan Irlandia berlaku kausalitas searah yaitu pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pengeluaran pemerintah.
8. Ranis (2004) yang menyatakan bahwa pembangunan manusia merupakan prasyarat untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, kebijakan pemerintah dan pendanaan publik mungkin perlu ditigkatkan. Negara dalam ambang batas pembangunan manusia apabila suatu bangsa terjebak siklus perangkap

kemiskinan. Rendahnya pembangunan manusia mungkin perlu target pemerintah dalam menginvestasikan dalam memenuhi biaya perbaikan pembangunan manusia . investasi ini meliputi biaya tetap sekolah, rumah sakit dan yang diperlukan perbaikan pemerintahan untuk secara efektif melaksanakan proyek investasi tersebut.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan bagian untuk menunjukkan kerangka berfikir dengan tujuan menjelaskan keterkaitan antara variabel yang diteliti berdasarkan rumusan masalah yang berlandaskan kajian teori diatas. Keterkaitan variabel yang diteliti adanya pengaruh pertumbuhan ekonomi (Y1) dan pengeluaran pemerintah (Y2) dengan kualitas sumber daya manusia (Y3).

Pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah memiliki hubungan positif. peningkatan perekonomian yang terjadi mempengaruhi pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif terhadap kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan perkapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga kualitas sumberdaya manusia juga meningkat.

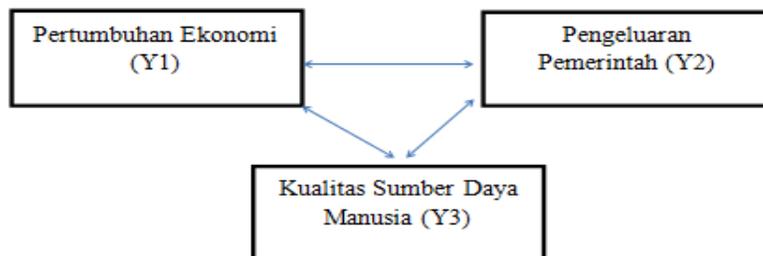
Pengeluaran pemerintah memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. pengeluaran pemerintah yang mendorong peningkatan permintaan agregat yang diikuti peningkatan produksi barang dan jasa yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga pengeluaran pemerintah dipandang sebagai

kekuatan eksogenus yang mengubah output agregat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam kasus ini pertumbuhan ekonomi sebagai fungsi dari pengeluaran pemerintah.

Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan memiliki hubungan yang positif terhadap kualitas sumberdaya manusia. Jika pengeluaran pemerintah naik maka indeks pembangunan manusia juga meningkat yang di tandai dengan penyediaan fasilitas oleh pemerintah.

Kualitas sumberdaya manusia yang diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya peningkatan pembangunan manusia mampu meningkatkan produktifitas tenaga kerja yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Kualitas sumber daya manusia memiliki hubungan positif terhadap pengeluaran pemerintah. Peningkatan pembangunan manusia akan berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah.



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Kualitas Sumberdaya Manusia

D. Hipotesis

Sebagai jawaban sementara dari permasalahan yang dikemukakan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Terdapat hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah di Provinsi Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

2. Terdapat hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumberdaya manusia di Provinsi Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

3. Terdapat hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah dan kualitas sumberdaya manusia di Provinsi Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 \neq 0$$

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis dan Pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pertumbuhan Ekonomi mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah dan Pengeluaran Pemerintah tidak mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi. Artinya peningkatan atau penurunan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah, namun peningkatan dan penurunan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. sehingga dapat di simpulkan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah memiliki hubungan satu arah.
2. Pertumbuhan Ekonomi mempengaruhi Kualitas Sumberdaya Manusia, dan Kualitas Sumberdaya Manusia tidak mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi. Artinya peningkatan maupun penurunan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kualitas Sumberdaya Manusia dan peningkatan maupun penurunan Kualitas Sumberdaya Manusia tidak memberi dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sehingga dapat disimpulkan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah memiliki hubungan satu arah.
3. Pengeluaran Pemerintah tidak mempengaruhi Kualitas Sumberdaya Manusia, dan Kualitas Sumberdaya Manusia mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah. Artinya peningkatan maupun penurunan Pengeluaran Pemerintah tidak

memberikan pengaruh terhadap Kualitas Sumberdaya Manusia dan peningkatan maupun penurunan Kualitas Sumberdaya Manusia memberikan dampak terhadap Pengeluaran Pemerintah Sehingga dapat disimpulkan antara Pengeluaran Pemerintah dan Kualitas Sumberdaya Manusia tidak memiliki hubungan satu arah maupun dua arah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk dapat mengambil kebijakan dengan meningkatkan anggaran pengeluaran pemerintah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat, melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tiap Kabupaten/Kota agar dapat memberikan efek positif terhadap pengeluaran pemerintah yaitu meningkatkan besarnya anggaran belanja pemerintah dalam menstabilkan dan meningkatkan perekonomian secara berkesinambungan.
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk meningkatkan anggaran pengeluaran pemerintah dalam menunjang peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.
3. Diharapkan kepada peneliti lebih lanjut yang membahas hubungan kausalitas antara Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Kualitas Sumberdaya Manusia sebagai bahan acuan agar dapat memperoleh

hasil penelitian yang lebih baik sehingga dapat memberikan saran yang lebih baik untuk menangani masalah Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Kualitas Sumberdaya Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anitasari, Merri & Soleh, Ahmad. (2012). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu. *Economics Review*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu
- Ariefianto, Moch. Doddy. 2012. *Ekonometrika, Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews*. Jakarta: Erlangga.
- Arsyad, Lincoln. 2004. *Ekonomi Pembangunan Edisi keempat*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN
- Badan Pusat Statistik. 2018. Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota, 2010-2017 (<https://www.bpssumbar.go.id/>) Diakses Pada 5 Oktober 2018
- _____. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota 2010 (<https://www.bpssumbar.go.id/>) Diakses Pada 11 Oktober 2018
- _____. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2011 (<https://www.bpssumbar.go.id/>) Diakses Pada 10 Oktober 2018
- _____. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2012 (<https://www.bpssumbar.go.id/>) Diakses Pada 10 Oktober 2018
- _____. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2013 (<https://www.bpssumbar.go.id/>) Diakses Pada 10 Oktober 2018
- _____. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014 (<https://www.bpssumbar.go.id/>) Diakses Pada 10 Oktober 2018
- _____. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2015 (<https://www.bpssumbar.go.id/>) Diakses Pada 10 Oktober 2018
- _____. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2016 (<https://www.bpssumbar.go.id/>) Diakses Pada 10 Oktober 2018
- _____. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2017 (<https://www.bpssumbar.go.id/>) Diakses Pada 10 Oktober 2018